

BAB I

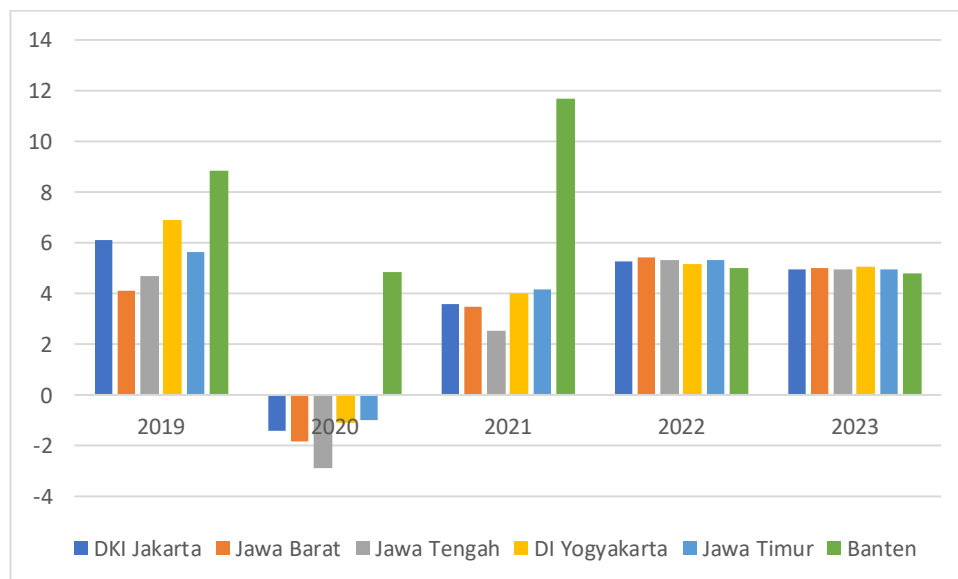
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan indikator krusial yang mencerminkan kemajuan dan perkembangan perekonomian negara. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), yang menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode. Berbagai faktor, seperti investasi, kebijakan pemerintah, serta kondisi global yang memengaruhi perdagangan dan aliran modal, berperan dalam memengaruhi pertumbuhan tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketimpangan pendapatan dan dampak terhadap lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, sehingga manfaat dari pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, pertumbuhan ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong utama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata

Dunia sedang mengalami tekanan yang sangat berat, baik dalam kesehatan maupun ekonomi, yang disebabkan oleh wabah yang pertama kali ditemukan di Hubei, China pada 31 Desember 2019 (Sohrabi et al., 2020). Implementasi ini berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi global. Masalah pertumbuhan ekonomi mencakup beragam aspek, bukan hanya tentang pertumbuhan output

penting, hingga seluruh tatanan sosial dan kelembagaannya(Djalante et al. n.d.). Apa saja faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi pandemi? Dalam upaya menangani Covid-19, Indonesia meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui paket stimulus sambil tetap menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan bantuan sosial. Relaksasi yang diterapkan pada bulan Juli 2020 juga berperan penting. Paket stimulus tersebut membantu kelancaran kegiatan produksi dan mendorong aktivitas ekspor selama pandemi. Fenomena ini berdampak positif pada konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam selama tahun 2020 (Iriyadi & Purba, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1. 1 Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

(persen)

Pulau Jawa secara keseluruhan berkontribusi sebesar 57 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) nasional di tahun 2023, sehingga kinerja setiap provinsinya menjadi faktor kunci dalam stabilitas makroekonomi Indonesia. Periode 2019–2023 yang termasuk guncangan akibat pandemi *COVID-19* dan tahap pemulihan selanjutnya memberikan konteks empiris yang penting untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi tahunan dari enam provinsi utama di Jawa (Jabar Diskominfo 2023).

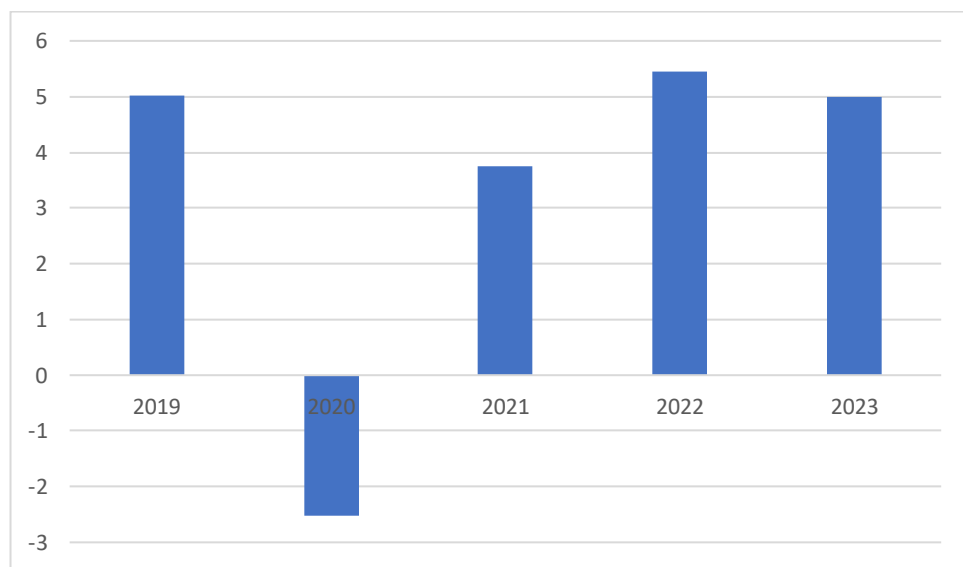
Provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama 2019 hingga 2023 menunjukkan tiga pola yang berbeda. Di tahun 2019 (Fase Pra-Pandemi), semua provinsi mencatat pertumbuhan positif, yang Dimana Banten menunjukkan 8.8% dan DI Yogyakarta (DIY) menunjukkan 6.9%, sedangkan Jawa Barat (Jabar) mencatat LPE terendah sekitar 4.2%. Laju pertumbuhan Jabar yang cenderung lebih lambat ini, di bawah Jawa Timur 5.7% dan DKI Jakarta 6.0%, menunjukkan adanya tekanan struktural yang telah dialami oleh provinsi industri ini. (Jabar 2016).

Tahun 2020 Fase Guncangan Akut ditandai dengan kontraksi yang merata sebagai dampak dari pandemi, tetapi tingkat kontraksinya menunjukkan ketahanan struktural yang bervariasi (Cherlyn et al. 2021). Tingkat kedalaman kontraksi ini menunjukkan kerentanan yang lebih besar terhadap pembatasan mobilitas. Sebaliknya, Jawa Barat hanya mengalami kontraksi sekitar -1.0%, yang menunjukkan ketahanan struktural yang lebih baik (Santo Bangun Y. BPS 2021), Meskipun kegiatan domestik terganggu, sektor manufaktur besar yang berorientasi ekspor di Jabar mampu menjaga basis produksi dan logistiknya.

Dimulai dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2021, di mana Banten mencatat 11.8%. Jawa Timur dan DIY juga menunjukkan pemulihan yang baik 4.0%. Jabar dan DKI Jakarta mengalami pemulihan yang lebih moderat 3.5%. Pada tahun 2022 dan 2023, Pertumbuhan ekonomi di semua provinsi menunjukkan tren konvergensi yang jelas, stabil di 4.8% hingga 5.5%, di mana Jabar mencapai 5.4% (2022) dan 5.0% (2023), yang menunjukkan kembalinya laju pertumbuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor struktural dalam jangka menengah.(Abie Rachman Muhamad and Dewi Rahmi 2023)

Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai fokus studi memiliki alasan kuat yang melebihi ukuran kontribusinya. Hal ini berpusat pada keunikan pola pertumbuhan pasca-pandemi serta adanya tantangan pembangunan yang mendalam, yang dikenal sebagai Paradoks Pertumbuhan Jawa Barat. Alasan ini didasarkan pada pentingnya Jabar dalam konteks makroekonomi sebagai penyumbang ekonomi terbesar ketiga di Indonesia, yang membuat kebijakan yang relevan semakin signifikan (Jabar 2024). Selain itu, struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi pada sektor Industri Pengolahan memberikan kejelasan analitis yang memungkinkan pemodelan dampak kebijakan industri secara spesifik. Lebih jauh, pola pemulihan Jabar yang stabil 5,0% pada 2023 menjadikannya contoh studi yang ideal untuk menganalisis keberlanjutan dan kualitas pertumbuhan struktural, alih-alih hanya melihat pada rebound statistic(Ghania, Khatimah, and Azrimultiya 2025). Urgensi akademik dari penelitian ini berfokus pada paradoks yang teridentifikasi melalui studi besarnya kontribusi sektor perekonomian Provinsi Jawa Barat ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,

terlihat dari beberapa indikator ekonomi seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih di bawah tingkat optimal. Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh keragaman spasial di dalam Jawa Barat, di mana Tipologi Klassen menunjukkan adanya konsentrasi signifikan pada daerah di Kuadran II (pertumbuhan tinggi, namun tingkat pendapatan per kapita lebih rendah (Santo Bangun Y. BPS 2021)).



Sumber : Badan Pusat Statistika

**Gambar 1. 2 Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2019-2020
(persen)**

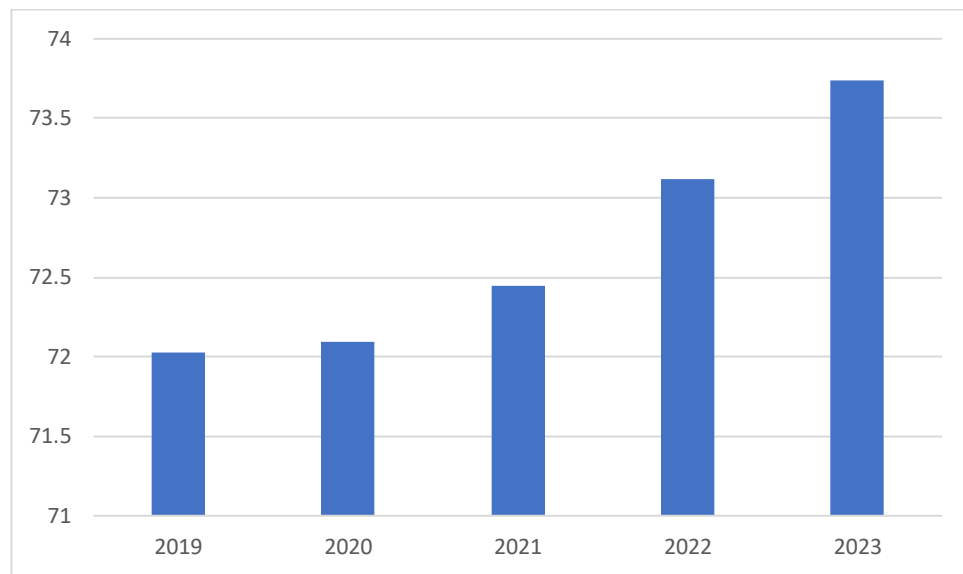
Pada tahun 2019, ekonomi Jawa Barat mengalami pertumbuhan signifikan dengan angka hampir mencapai 5%. Ini merupakan hasil dari penguatan sektor industri, investasi, dan konsumsi masyarakat yang meningkat. Namun, pada tahun 2020, dampak dari pandemi *COVID-19* membawa perubahan signifikan, mengakibatkan kontraksi ekonomi yang tajam, tercermin dengan angka

pertumbuhan negatif yang menurun. Banyak industri terpaksa berhenti beroperasi, dan aktivitas ekonomi keuangan menjadi terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2021, perlahan-lahan ekonomi mulai pulih, didukung oleh program-program stimulus pemerintah dan penerapan protokol kesehatan yang memungkinkan sektor-sektor ekonomi untuk bangkit kembali. Ekspansi ini berlanjut di tahun 2022, di mana pertumbuhan kembali stabil dengan kontribusi positif dari sektor perdagangan, konstruksi, dan layanan. Memasuki tahun 2023, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan tetap kuat, meskipun ada tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi global. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir mencerminkan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan, serta komitmen untuk mendorong pemulihan berkelanjutan menuju pertumbuhan yang lebih inklusif. (Ayuning Lestari & Amaliah, 2023)

Indikator lain yang dianggap krusial dalam menilai keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan. Tingkat rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk. Namun, masalah yang terkait dengan IPM bervariasi di setiap daerah. Pemerintah daerah selaku pelaksana pembangunan pastinya memerlukan modal manusia yang berkualitas. Dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memerlukan usaha untuk meningkatkan kualitas SDMnya, adapun kualitas Sumber Daya Manusia bisa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Dewi et al., 2017). Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan

ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek. Agar pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan pembangunan manusia, perlu adanya upaya untuk menciptakan pembangunan yang merata. Dengan pemerataan pembangunan, setiap penduduk akan merasakan manfaat dari hasil-hasil yang diperoleh. Di Indonesia, pembangunan manusia telah menerapkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP dan diintegrasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). IPM berfungsi sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan dari dua aspek, yaitu sosial dan ekonomi.

Dari aspek sosial, IPM meliputi indeks harapan hidup (*longevity*) yang dihitung berdasarkan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), serta indeks pendidikan yang mencakup angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dari sisi ekonomi, indeks standar hidup layak (*decent living*) diperoleh dengan mengacu pada data nilai pengeluaran per kapita serta paritas daya beli. Dengan demikian, IPM menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi dan memastikan peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Ii & Teori, 2017).



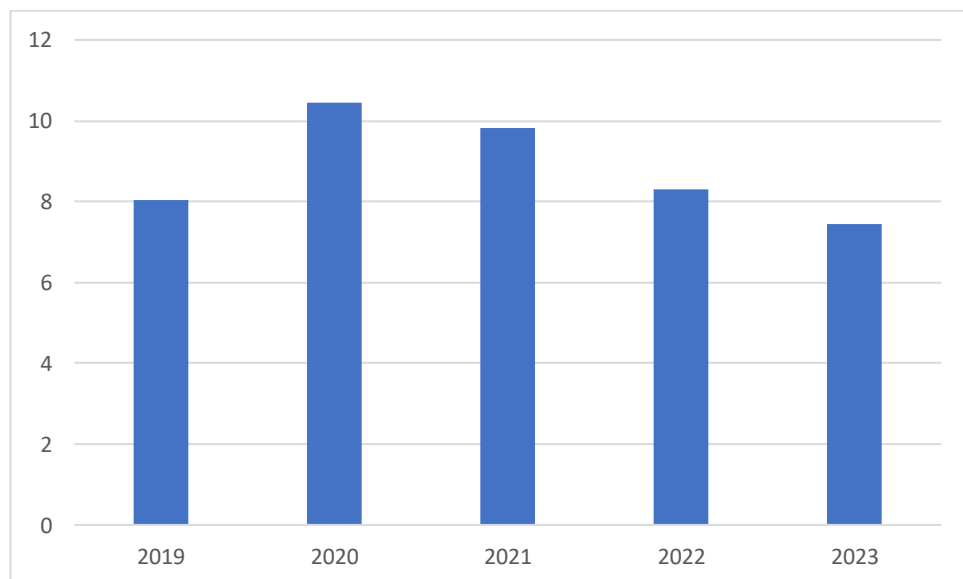
Sumber : *Badan Pusat Statistika*

**Gambar 1. 3 Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tahun 2019-2023
(poin)**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2019, IPM Jawa Barat tercatat pada angka 71,5, yang mencerminkan kondisi awal dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan IPM akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu sektor kesehatan dan pendidikan, langkah-langkah pemulihan mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Masuki tahun 2021, IPM mulai pulih dan tercatat di angka 72. Hal ini menandakan bahwa berbagai program pemerintah, seperti peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, mulai membuahkan hasil dalam mengatasi dampak negatif akibat pandemi. Di tahun-tahun berikutnya, yaitu 2022 dan 2023, tren pertumbuhan lebih pesat terlihat

dengan IPM mencapai 73,5 pada tahun 2023. Kenaikan ini tidak terlepas dari kontribusi sektor industri, pengembangan infrastruktur, serta terus bertumbuhnya investasi di Jawa Barat.

Masalah pengangguran selalu menjadi tantangan yang sulit diatasi di berbagai wilayah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, jumlah pencari kerja juga akan meningkat. Apabila tenaga kerja tidak bisa diterima dalam dunia kerja, maka mereka akan dianggap sebagai penganggur. Pengangguran adalah kondisi di mana angkatan kerja berusia 15 hingga 65 tahun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Individu yang tidak sedang mencari pekerjaan, seperti pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, biasanya karena mereka tidak membutuhkan pekerjaan saat itu. (Gimnastiar 2024)



Sumber : *Badan Pusat Statistika*

**Gambar 1. 4 Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat tahun 2019-2023
(persen)**

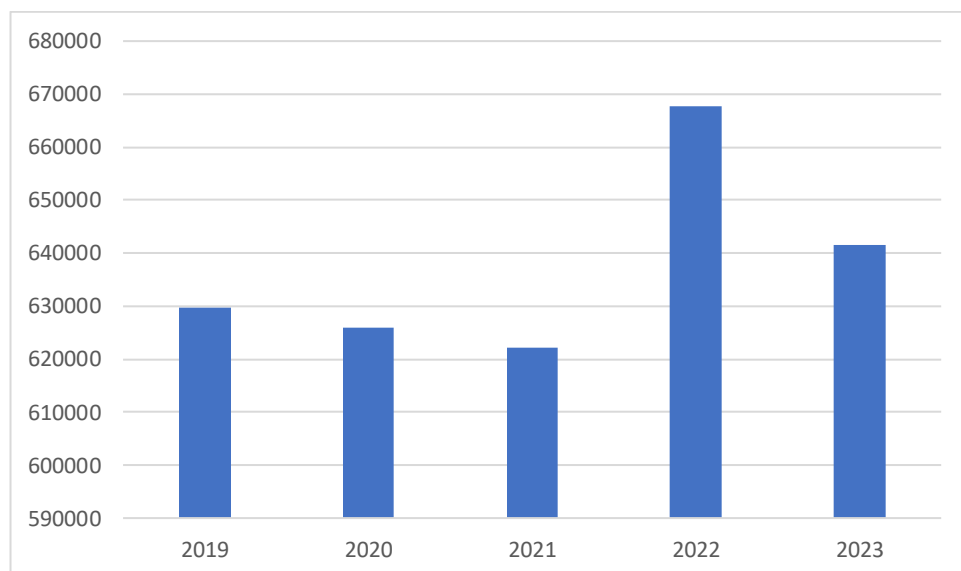
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator kunci yang mencerminkan keadaan pasar tenaga kerja serta kesehatan ekonomi suatu daerah. Di Provinsi Jawa Barat, antara tahun 2019 hingga 2023, TPT menunjukkan pola pergerakan yang signifikan dan sangat berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi regional. Pada tahun 2019, TPT di Jawa Barat mencapai sekitar 8,00%, angka yang terbilang tinggi dan mencerminkan tantangan dalam menyerap tenaga kerja, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja, perubahan dalam struktur ekonomi, dan perlambatan di sektor-sektor produktif (Mauliddiyah, 2021)

Dengan hadirnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kondisi pasar tenaga kerja semakin tertekan karena banyak sektor ekonomi mengalami kontraksi, yang pada gilirannya menyebabkan lonjakan pengangguran yang tidak terhindarkan. Penelitian oleh (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021) menunjukkan bahwa dampak pandemi sangat dirasakan baik di sektor informal maupun formal, yang memperburuk tingkat pengangguran di Jawa Barat. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023, muncul tanda-tanda pemulihan ekonomi seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan dan adanya stimulus ekonomi yang meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Badan Pusat Statistik Jawa Barat melaporkan penurunan TPT yang signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 7,44%, yang mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produktif.

Hidayat dan Iskandar (2022) dalam studi mereka menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, hubungan antara TPT dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama periode tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Jika tidak diatasi, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan potensi produktivitas yang ada.

Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM). Kesulitan dalam berbisnis mengakibatkan banyak tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Selama masa pandemi, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari cara tradisional (offline) ke platform digital (online). Para pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mencapai target yang telah ditetapkan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam situasi new normal, pelaku UMKM pun harus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi ini. Menurut penelitian (Kusuma and Haviz 2025) bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Indonesia serta memainkan peran kunci dalam penciptaan lapangan kerja. Penelitian tersebut menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan akses terhadap

pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan, yang dapat mempercepat pertumbuhan UMKM. UMKM senantiasa dipandang sebagai sektor vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan terlibat dalam usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun modern. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja.



Sumber : *Badan pusat statistika*

Gambar 1. 5 Jumlah unit UMKM di Jawa Barat tahun 2019-2023 (unit)

Jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat merupakan cerminan yang penting dari dinamika perekonomian daerah. Grafik yang tersedia menunjukkan tren jumlah unit UMKM dari tahun 2019 hingga 2023, memberikan gambaran mengenai ketahanan dan pertumbuhan sektor ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2019, jumlah unit UMKM di Jawa Barat tercatat sekitar 63. 000 unit, mencerminkan stabilitas yang terjaga sebelum

munculnya pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar 62.000 unit, yang dapat dihubungkan dengan dampak negatif pandemi yang mengguncang perekonomian, mengakibatkan banyak UMKM terpaksa menutup atau mengurangi operasionalnya. Setelah melewati masa-masa sulit tersebut, Puncak pertumbuhan unit UMKM terjadi pada tahun 2022, dengan lonjakan signifikan ke angka hampir 68.000 unit. Kenaikan ini mencerminkan geliat ekonomi yang positif, berkat dukungan berbagai program pemerintah dan inisiatif pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Para pelaku UMKM mulai menjelajahi peluang baru dan berinovasi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan yang ada. Memasuki tahun 2023, meskipun jumlah unit UMKM sedikit menurun menjadi sekitar 64.000 unit, angka ini tetap menunjukkan potensi besar sektor UMKM di Jawa Barat untuk bertahan dalam menghadapi perubahan. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan perjalanan UMKM di Jawa Barat, yang tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki elemen-elemen yang mendorong perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam konteks pemulihan setelah pandemi *COVID-19*. Keunikan dari penelitian ini terletak pada analisis jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian Indeks Pembangunan manusia, Tingkat pengangguran terbuka, Jumlah unit UMKM di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, jumlah unit UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan aktivitas ekonomi yang tinggi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil selama periode 2019 hingga 2023. Namun, belum jelas bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan dua pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2023?
- b. Bagaimana pengaruh secara bersama Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor pembangunan. Untuk memahami faktor-faktor tersebut secara lebih spesifik di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini bertujuan:

- a. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah unit UMKM secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kota/kabupaten Jawa Barat Tahun 2019 - 2023
- b. Menganalisis Pengaruh secara bersama IPM, TPT dan Jumlah unit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi pada kota/kabupaten Jawa Barat Tahun 2019 - 2023

1.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota yang memiliki beragam karakteristik ekonomi. Area yang diteliti mencakup kawasan dengan variasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bervariasi, seperti Kabupaten Bogor, Bandung, Garut, Karawang, Bekasi, serta Kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Depok. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika ekonomi di Jawa Barat dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Melalui analisis berbagai faktor di daerah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rekomendasi dan penerapan pengetahuan untuk kemajuan sektor pendidikan dan ekonomi serta menyajikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah unit UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kota/kabupaten di Jawa Barat

a. Kegunaan Akademik

Secara akademik dengan memperkaya pembangunan ekonomi pembangunan, khususnya dalam Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka dan jumlah UMKM pada pertumbuhan ekonomi di perkotaan/distrik di Jawa Barat. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para sarjana dan siswa untuk memahami dinamika ekonomi lokal dan faktor faktor yang memengaruhi mereka. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode analisis ekonomi yang lebih luas dan berlaku. Faktanya, hasil penelitian ini juga dapat didasarkan pada data sebagai dasar ilmiah untuk perumusan kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

b. Kegunaan Praktik

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan keuntungan nyata bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, pengusaha UMKM, dan masyarakat luas. Untuk pemerintah daerah, temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efisien, terutama

dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, menurunkan angka pengangguran, serta mendorong perkembangan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.3.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan semester genap tahun ajaran 2025, dimulai bulan januari 2025 sampai sekarang.

Tabel 1. 1 Jadwal penelitian

[illegible]